

MUNCULNYA NEOLIBERALISME SEBAGAI BENTUK BARU LIBERALISME

Siti Aminah Caniago¹

Abstract: Many strategies have been used by politicians to win in the election since Indonesia began starting to adopt full democracy. One of emerged issues which was promoted by candidate was economic exploitation that seemed like a neoliberal system. In the other hand, public had no sufficient information and understanding on neoliberal system. Based on that, the experts are in charge to give right information in order to avoid perplexing people deals with the neoliberal system. This paper attempts to describe some aspects of neoliberal.

Kata Kunci: sistem ekonomi, neoliberal, liberal

A. Pendahuluan

Setelah KPU mengumumkan secara resmi pemenang PEMILU Presiden dan Wakil Presiden 2009, gonjang-ganjing Neoliberal tak terdengar gemingnya lagi. Rakyat yang begitu simpati terhadap perekonomian dan tidak memahami tentang sistem perekonomian khususnya tentang sistem perekonomian liberal perlu mendapat sedikit tentang pemahaman liberal atau neoliberal. Kalau kita lihat sepintas, sebetulnya liberal atau neoliberal sudah ada sebelumnya. Munculnya sekarang ke permukaan dikarenakan suasana persaingan para calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2009 dalam menjatuhkan lawan. Perekonomian yang dipolitisasi semacam ini perlu ada pemahaman bagi masyarakat agar tidak mendapat kegelisahan atau kekecewaan kepada pemimpinnya. Pada tulisan ini penulis memberikan sedikit pengetahuan tentang apa itu liberal atau neoliberal.

B. Sistem Ekonomi

Setiap negara mempunyai sistem ekonomi yang berbeda-beda. Sistem ekonomi ini bisa ditentukan oleh falsafah suatu negara, jati diri suatu bangsa, struktur ekonomi suatu negara, budaya, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi adalah sebagai cara pengorganisasian satuan ekonomi untuk membuat keputusan-keputusan mengenai berbagai masalah ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang diharapkan (Arifin, 2009:15). Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi merupakan cara suatu negara menata perekonomiannya agar didapat suatu tujuan yang diinginkan agar masyarakat sejahtera secara ekonomi. Indonesia yang dilahirkan dari suatu penduduk yang agraris dan pengelolaan pertanian secara tradisional, maka sepatutnya memakai sistem ekonomi kerakyatan. Namun, tidak serta merta ini bisa diterapkan secara murni karena negara kita merupakan suatu negara yang berdaulat yang mempunyai hubungan dengan negara lain dari segi politik, sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya yang tidak akan lepas dari hubungan pengaruh ekonomi. Sebaliknya, negara kita juga tidak bisa menjalankan ekonomi liberal karena akan berdampak pada penjajahan ekonomi kepada bangsa Indonesia karena dari segi sumber daya manusia yang masih belum bisa bersaing dengan dunia internasional yang telah lebih maju, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun teknologinya.

Banyak pembagian Sistem Ekonomi yang terdapat dalam setiap literatur, seperti buku *Doktrin Ekonomi Islam* karangan Rahaman (1995:2) yang membagi sistem ekonomi ke dalam

¹ Penulis adalah dosen pada Jurusan Syariah STAIN Pekalongan

tiga bagian, yaitu Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, dan Islam. Menurut Zadjuli (1999:1) terdapat 11 sistem ekonomi di dunia dan 10 telah gagal dalam menjalankannya, yaitu Merkantilis, Klasik dan Neoklasik, Kapitalis, Sosialis, Komunis, Sistem Ekonomi Berencana di dunia ketiga, *Monetary Orde*, Orde Strukturalis, Sistem Ekonomi Campuran, *Post Industrial State* Ekonomi, dan Sistem Ekonomi Islam. Menurut Sumarni dan Soeprihanto (1987:19) ada 6 sistem ekonomi, yaitu Merkantilis, Kapitalis, Komunisme, Facisme, Sosialisme, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia.

Penulis akan membagi sistem ekonomi ini berdasarkan keterkaitannya dengan topik yang dibahas dan tidak akan mengurangi signifikansi yang dikemukakan pada berbagai literatur, yaitu sebagai berikut.

a. Sistem Ekonomi Tradisional

Pada sistem ekonomi ini kegiatan ekonomi hanya dilakukan secara tradisional dan belum menyentuh antara pelaku ekonomi yang satu dengan yang lain dan ini hanya terjadi pada masyarakat yang tingkat taraf hidupnya masih rendah dan untuk hanya memenuhi standar hidup minimal dan dilakukan biasanya secara gotong royong.

b. Sistem Ekonomi Terpusat

Sistem ekonomi terpusat merupakan sistem ekonomi yang segala kegiatan perekonomian diatur oleh negara. Pada sistem ekonomi ini tidak semata-mata kegiatan ekonomi bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Semua faktor produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara. Kepemilikan individu dan swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi tidak diberi kesempatan. Negara di samping sebagai regulator juga sebagai *owner* (pemilik). Pada sistem ekonomi ini tidak akan ada orang yang memiliki kekayaan melimpah. Penghasilan yang didapat akan digunakan untuk kepentingan bersama. Sistem Ekonomi Terpusat ini disebut juga dengan sistem ekonomi sosialis.

c. Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal ini kebalikan dari sistem ekonomi sosialis, yaitu segala sesuatu diserahkan kepada pasar. Hukum *supply and demand* (penawaran dan permintaan) berlaku di sini. Pelaku ekonomi diberi hak seluas-luasnya untuk bersaing dan memiliki strategi untuk memenangkan persaingan dalam produksi suatu produk dan memasarkan produk mereka. Negara atau pemerintah hanya sebagai pelindung dan fasilitator atau penengah dalam menjaga agar kelangsungan kegiatan ekonomi tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya dan semulus-mulusnya. Pemerintah tidak boleh membuat regulasi dan kebijakan yang menghalangi kegiatan pasar atau perekonomian, baik individu maupun swasta. Individu dan swasta dipersilakan untuk melakukan kegiatan ekonomi sebaik-baiknya agar memperoleh laba yang sebesar-besarnya.

d. Sistem Ekonomi Campuran

Untuk menjalankan roda perekonomian sangatlah sulit sehingga suatu negara biasa menjalankan salah satu sistem ekonomi tertentu (sosial atau liberal). Apalagi dalam suasana modern sekarang ini, satu negara akan perlu berhubungan dengan negara lain untuk menyejahterakan masyarakatnya sehingga satu dengan yang lain saling terkait. Dalam keterkaitan ini, pemerintah atau negara perlu membuat suatu regulasi atau kebijakan sehingga negara bisa menjalankan hubungan diplomatiknya, bukan hanya hubungan ekonomi. Hubungan dengan dunia Internasional tidak akan terlepas dari dampak ekonomi.

Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang mengadopsi sebagian dari semua sistem ekonomi tertentu (tradisional, terpusat, liberal, sosialis). Sistem ekonomi campuran akan menghilangkan atau mengurangi kekurangan-kekurangan atau

kelemahan-kelemahan sistem ekonomi sosial dan liberal. Pemerintah membuat regulasi kebijakan untuk mengatur roda perekonomian, namun memberikan kesempatan dan kerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Pemerintah membuat perencanaan sesuai dengan regulasi dan perencanaan roda perekonomian ini dapat dijalankan oleh pemerintah dan pihak swasta. Dengan sistem ekonomi campuran ini, pihak swasta juga mempunyai kesempatan untuk mengelola sektor-sektor strategis yang melibatkan hidup orang banyak.

C. Liberal

Liberal merupakan ekonomi pasar yang mempunyai kebebasan untuk melakukan langkah-langkah kegiatan ekonomi kepada pelaku-pelaku ekonomi bertransaksi. Dalam sistem ekonomi liberal, campur tangan pemerintah tidak ada, kecuali hanya sebagai kontrol agar terlaksananya interaksi ekonomi. Semua orang diberi kebebasan untuk memilih usahanya. Masyarakat bebas mengambil keuntungan, bebas memilih pekerjaan, dan lain sebagainya. Namun, kemampuan untuk bersaing sangat menentukan. Bagi masyarakat yang tidak sanggup bersaing akan selalu tertindas karena bisa dieksploitasi bagi yang kuat, baik dari segi modal atau kapital maupun *knowledge*.

Kapitalisme mempertahankan sistem liberal karena kebebasan seperti ini sebagai hakikat dari penciptaannya. Dalam perjalanannya, kapitalisme selalu menyesuaikan dan menjaga kebebasan tersebut. Misalnya masalah upah pekerja, menurut konsepsi kapitalis semua keputusan pemerintah atau tuntutan publik adalah tidak relevan. Kemudian paham yang terbentuk bagi kaum liberal adalah kebebasan, berarti ada sejumlah orang yang akan menang dan sejumlah orang yg akan kalah. Kemenangan dan kekalahan ini terjadi karena persaingan. Kebebasan akan diartikan sebagai memiliki hak-hak dan mampu menggunakan hak-hak tersebut dengan memperkecil turut campurnya aturan pihak lain seperti “Kita berhak menjalankan kehidupan sendiri.”

Konsep ekonomi liberalis berdasar dari sistem ekonomi kapitalisme yang mengandalkan secara penuh perputaran roda ekonomi melalui mekanisme pasar bebas serta perpindahan modal secara bebas di dalam negeri maupun antarnegara (pasar global).

Namun pada kenyataannya di negara-negara maju di Eropa, Amerika, dan sebagian Asia yang berlabel kapitalis, tidaklah sepenuhnya menerapkan perekonomian dengan mekanisme pasar bebas karena masih ada bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi, tunjangan, dan fasilitas sosial bagi masyarakat golongan menengah ke bawah, melindungi industri atau produk lokal dari persaingan dengan produk-produk impor. Pemerintah juga menguasai saham seluruhnya atau sebagian dari saham perusahaan-perusahaan yang dinilai strategis bagi kepentingan nasional atau kesejahteraan rakyat.

D. Neoliberalisme

Neoliberalisme sendiri merupakan nomenklatur yang diciptakan dari luar. Istilah umum yang dikenal adalah liberalisme. Istilah ini berangkat dari filsafat pada masa pencerahan Eropa berupa kebebasan individu dan pasar yang otonom. Di samping itu, neoliberalisme merupakan tahap lanjutan dari liberalisme yang berkembang sekitar abad 18 sampai abad 19 di Barat. Liberalisme asal mulanya adalah bentuk perjuangan kaum *borjuis* dalam menghadapi kaum konservatif atau feodal. Liberalisme merupakan ideologi kaum *borjuis* kota. Dalam arti luas, liberalisme adalah paham yang mempertahankan otonomi individu melawan intervensi komunitas. Dalam konteks definisi ada “*civic liberalism*” maupun

liberalisme ekonomi. Liberalisme ekonomi inilah yang nantinya berkembang menjadi neoliberalisme.

Neoliberalisme ini kemudian dilatarbelakangi oleh beragam kegagalan kebijakan ekonomi teknokratis dan intervensionis pada tahun 60-an yang melahirkan ketidakpuasan dan konflik kepentingan. Seperti halnya pemikiran-pemikiran ekonomi lainnya, kemunculan neoliberalisme dipicu krisis berupa *stagflasi* pada 1970-an di negara-negara maju yang memberi angin haluan ini untuk menyerang balik kubu prointervensi dan membawa kembali sebagai wacana kebijakan ekonomi dominan. Kebijakan neoliberal sukses mengurangi inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa negara.

Perekonomian Inggris membaik setelah Margareth Thatcher menjadi Perdana Menteri Inggris pada tahun 1979. Demikian pula kepemimpinan Ronald Reagan di Amerika Serikat selama dua periode (1981–1989), yang berhasil menurunkan inflasi dan pengangguran. Keduanya menerapkan kebijakan yang sama, yaitu privatisasi, deregulasi, serta pengurangan pajak dan subsidi.

Neoliberalisme sendiri bukan merupakan satu teori besar, melainkan merupakan *hedging* dari serpihan-serpihan beberapa teori kontemporer antiintervensi yang dikembangkan pada konteks historis, politis, dan institusi tertentu. Neolib dapat dikatakan merupakan *revival* pemikiran ekonomi klasik yang mengadvokasi pasar bebas, kebebasan individu, dan intervensi negara minimal dalam perekonomian yang merupakan kumpulan teori tentang relasi antarnegara, pasar, individu, dan masyarakat dalam sebuah sistem perekonomian yang berlandaskan kapitalisme. Dengan kata lain, kemunculan neoliberal pada tahun 1960-an ini dilatarbelakangi oleh beragam kegagalan kebijakan ekonomi teknokratis dan intervensionis. Neoliberal mensyaratkan dua hal. Pertama, meminimalisir intervensi negara. Kedua, mengakui kebebasan individu.

Pada intinya, paham ini memperjuangkan *laissez faire* (persaingan bebas), yakni paham yang memperjuangkan hak-hak atas kepemilikan dan kebebasan individual. Mereka lebih percaya pada kekuatan pasar untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial ketimbang melalui regulasi negara. Kata *neo* dalam neoliberalisme merujuk pada bangkitnya kembali bentuk baru aliran ekonomi liberalisme lama yang dulu dibangkitkan ekonom Inggris Adam Smith dalam karyanya “*The Wealth of Nations*”, saat itu dia dan kawan-kawannya menggagas penghapusan intervensi pemerintah dalam ekonomi.

E. Munculnya Neoliberalisme

Dalam liberalisme, pemerintah harus membebaskan mekanisme pasar bekerja, harus melakukan deregulasi dengan mengurangi *restriksi* (hambatan) pada proses produksi, mencabut semua rintangan birokratisasi perdagangan, ataupun menghilangkan tarif bagi perdagangan demi menjamin terwujudnya *free trade*. Perdagangan dan persaingan bebas adalah cara terbaik bagi ekonomi nasional untuk berkembang. Dengan demikian, liberalisme di sini berkonotasi “bebas dari kontrol pemerintah”, atau kebebasan individu untuk menjalankan persaingan bebas, termasuk kebebasan bagi kaum kapitalis untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Ekonomi model liberalisme inilah yang menjadi dasar bagi ekonomi Amerika pada tahun 1800-an sampai awal 1900-an. Akan tetapi, konsep tersebut akhirnya runtuh saat bencana depresi (*The Great Depression*) di tahun 1930-an melanda dunia. Ketika depresi ekonomi melanda dunia, muncul seorang ekonom Inggris yang bernama John Maynard Keynes, yang menantang paham liberal. Keynes mengembangkan gagasan alternatif bahwa pemerintah dapat dan harus melakukan intervensi dalam perekonomian, dan membangun sebuah model yang sama sekali baru.

Ekonomi Keynesian yang sering disamakan dengan *Welfare State* (Negara Kesejahteraan, yaitu pemilikan negara atas sebagian besar industri dan pemerintahan yang intervensionis) itu memengaruhi Presiden Roosevelt untuk melahirkan kebijakan yang dikenal dengan program “*New Deal*” karena dianggap berhasil menyelamatkan rakyat Amerika waktu itu. Sejak itu pula peran pemerintah atau negara dalam ekonomi makin dapat diterima, makin menguat, dan menenggelamkan paham liberalisme. Kebanyakan negara berkembang juga menganut strategi pembangunan yang didominasi oleh negara (*welfare state*).

Namun, krisis kapitalisme di akhir 1970-an menyebabkan semakin berkurangnya tingkat keuntungan kaum kapitalis yang berakibat pada jatuhnya akumulasi kapital mereka sehingga meneguhkan mereka untuk kembali pada sistem liberalisme. Doktrin ekonomi Keynesian dianggap sebagai penyebab kehancuran kapitalisme waktu itu yang dimotori oleh ekonom Milton Friedman dan Friederich Hayek. Mereka meyakini bahwa pasar bebas mampu memajukan ekonomi dibandingkan negara dan usaha negara dalam mengatasi kegagalan ekonomi yang lebih mendatangkan kerugian daripada keuntungan. Mereka ingin negara kembali pada fungsi dasarnya dengan cara melakukan deregulasi, privatisasi atau mengkontraksikan sejumlah fungsi negara kepada swasta. Modifikasi baru ataupun perkembangan dari sistem ekonomi liberalisme dan kapitalisme inilah yang memunculkan Neoliberal.

Melalui *corporate globalization*, mereka merebut kembali ekonomi dan berhasil mengembalikan paham liberalisme, bahkan dalam skala global. Paham liberalisme lama itu kini dihidupkan kembali secara global, yang dikembangkan melalui sebuah “konsensus” yang dipaksakan, yaitu Konsensus 1980-an yang dikenal dengan *The Washington Consensus*. Konsensus yang datang dari para pembela ekonomi pasar bebas yang berasal dari wakil perusahaan-perusahaan besar Transnasional Corporations (TNC’s) atau Multi Nasional Corporations (MNC’s), Bank Dunia, IMF serta wakil negara-negara kaya. Mereka menyebut kesepakatan itu sebagai “reformasi” ekonomi dengan kebijakan pasar bebas di era global. Intinya adalah negara harus melayani dan memberi kebebasan swasta untuk memperoleh superprofit (bukan sekedar profit).

F. *Washington Consensus*

Berbekal perkembangan teori dan kesuksesan aplikasi di negara maju, *World Bank*, IMF, dan Departemen Keuangan AS sepakat untuk menggeneralisasi berbagai teori ini dalam satu paket kebijakan yang dikenal dengan nama *Washington Consensus*. Dalam Diskusi Mengurai Polemik Ekonomi Neoliberal vs Kerakyatan, Selasa 26 Mei 2009 malam, Direktur Institute for Development of Economic & Finance, M Ikhsan Modjo, menjelaskan bahwa “*Washington Consensus* pada awalnya merupakan kesepakatan antara politisi kongres, badan pemerintah, dan Bank Sentral Amerika Serikat, serta lembaga keuangan internasional mengenai cara pemulihan ekonomi di negara-negara berkembang.

John Williamson, seorang ekonom, merumuskan *Washington Consensus* ke dalam sepuluh butir kebijakan (www.vivanews.com, 31 Juli 2009) yaitu sebagai berikut.

1. Disiplin fiskal

Dalam hal ini, hampir semua negara menerapkan sistem *budget deficit* untuk menyeimbangkan krisis neraca pembayaran dan tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini banyak dialami oleh negara-negara miskin karena kelompok orang kaya menyimpan uangnya di luar negeri.

2. Prioritas pengeluaran publik

Dalam hal ini, konsensus memilih untuk mengalokasikan pengeluaran pemerintah pada program-program yang berpihak kepada rakyat miskin seperti subsidi pendidikan dan kesehatan.

3. Reformasi pajak, yaitu membuat suatu model yang mengkombinasikan basis pajak yang luas dengan tingkat pajak yang rendah.
4. Liberalisasi suku bunga, yaitu tingkat suku bunga ditentukan oleh pasar dan positif secara riil.
5. Tingkat nilai tukar yang kompetitif.
6. Liberalisasi perdagangan terutama penghapusan lisensi dan tarif tunggal.
7. Liberalisasi investasi asing langsung.
8. Privatisasi BUMN
9. Deregulasi
Penghapusan regulasi yang menghambat persaingan kecuali untuk menjaga keamanan, lingkungan, perlindungan konsumen, dan pengawasan lembaga keuangan.
10. Perlindungan hak milik

Konsep ekonomi Neoliberalisme berdasar dari sistem ekonomi Kapitalisme yang mengandalkan secara penuh perputaran roda ekonomi melalui mekanisme pasar bebas serta perpindahan modal secara bebas di dalam negeri maupun antarnegara (pasar global). Namun pada kenyataannya di negara-negara maju di Eropa, Amerika, dan Asia yang berlabel kapitalis, tidaklah sepenuhnya menerapkan perekonomian dengan mekanisme pasar bebas karena masih ada bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi, tunjangan, dan fasilitas sosial bagi masyarakat golongan menengah ke bawah, melindungi industri atau produk lokal dari persaingan dengan produk-produk impor. Pemerintah juga menguasai saham seluruhnya atau sebagian dari saham perusahaan-perusahaan yang dinilai strategis bagi kepentingan nasional atau kesejahteraan rakyat.

Beberapa pokok pemikiran dari neolib dapat digolongkan sebagai berikut (www.hizbut-tahrir.or.id, 25 Mei 2009).

1. Monetaris

Ini adalah kelompok teori yang paling dikenal dalam kelompok neolib yang berpijak pada asumsi *adaptive* dan *rational expectation, market clearing* Walrasian (ketika *supply* sama dengan *demand*/titik ekuilibrium), serta *money neutrality* (perubahan dalam jumlah uang yang beredar hanya memengaruhi variabel nominal, bukan variabel riil) dalam jangka pendek dan *money non-neutrality* dalam jangka panjang.

2. Penolakan terhadap Perencanaan Terpusat

Argumen ini menentang sebuah perencanaan ekonomi terpusat oleh negara. Dasar argumen ini adalah bahwa perencanaan terpusat pada sebuah perekonomian yang modern dan kompleks serta terus-menerus berubah akan membutuhkan informasi di luar kemampuan sebuah negara. Mereka berpendapat bahwa yang mampu untuk memenuhi kebutuhan informasi itu adalah rivalitas individu dan pencari untung. Dapat dikatakan secara ekstrem bahwa semua bentuk intervensi negara akan gagal atau mengancam kemerdekaan. Argumen ini telah diterima secara luas, bahkan oleh kelompok yang prointervensi.

3. Kekakuan Lembaga

Teori ini merupakan ekspansi lebih jauh lagi dari argumen yang menentang sebuah perencanaan terpusat dan campur tangan negara. Argumen ini mengatakan bahwa setiap bentuk kelembagaan yang sengaja diciptakan untuk memberikan keuntungan tertentu pada kelompok tertentu atau pada perekonomian (proteksi perdagangan,

kebijakan upah minimum, atau jaring pengaman sosial) cenderung menciptakan kekakuan pada jangka panjang.

4. *Principal Agent Model of Bureaucracy*

Asumsi maksimasi harus diterapkan secara simetrik, baik terhadap agen dari sektor swasta maupun publik. Asumsi ini bukan hanya merendahkan kepercayaan publik terhadap birokrasi, tetapi juga menggugat asumsi negara kesejahteraan yang menisbatkan netralitas birokrasi.

5. *Rent Seeking*

Teori ini berargumen bahwa satu kebijakan industri dan substitusi impor, selain menghilangkan kemungkinan peningkatan kesejahteraan dari perdagangan, juga akan memicu merebaknya monopoli dan oligopoli di negara berkembang.

6. Penolakan terhadap Perusahaan Publik dan Privatisasi

Kaum neoliberal juga berpendapat bahwa perusahaan publik merupakan salah satu sumber utama dari inefisiensi ekonomi dan stagnasi yang dialami oleh banyak negara berkembang.

Dari paparan ini, dapat dikatakan bahwa yang dinamakan neoliberal tidak lebih dari kumpulan pemikiran antiintervensi pemerintah dalam perekonomian yang sangat beragam dan bisa saja bertentangan dengan akar pemikiran neoklasik. Akan tetapi, terlepas dari kekurangan dan bias intelektual, neoliberal juga menunjukkan kepada kita berbagai kelemahan fundamental dari visi teknokratik dalam suatu perekonomian.

G. Kekuatan dan Kelemahan Neoliberalisme

Setelah diuraikan panjang lebar tentang Neoliberalisme, dapat kita analisis kekurangan dan kelebihan dari Sistem Ekonomi Neoliberal secara Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan atas logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*), dan ancaman (*Threat*) (Rangkuty, 1999:18).

Analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan dari Sistem Ekonomi Neoliberal, dan peluang serta ancaman jika sistem ekonomi ini dalam kegiatan bisnis perekonomian. Dalam analisis ini, kekuatan dan kelemahan merupakan dominasi yang dimiliki oleh pihak internal, bisa saja seperti regulasi atau peraturan-peraturan pemerintah, para ekonom, dan sebagainya. Peluang dan ancaman merupakan keadaan yang datang atau situasi yang terjadi di pihak eksternal, bisa saja seperti pihak asing yang merupakan pelaku ekonomi di Indonesia, para investor luar negeri, dan sebagainya.

1. *Strength*

- a. Pertumbuhan ekonomi tinggi karena semua pihak bebas untuk berinvestasi, tidak ada aturan yg membatasi kemampuan investasi.
- b. Daya beli masyarakat ditingkatkan (stimulus, UMR naik), efek *multiplier*/domino (contohnya daya beli ditingkatkan, *demand* naik sehingga masyarakat membeli lebih banyak sehingga pengusaha untung, investasi bertambah, GDP naik, gaji naik, daya beli masyarakat naik, *demand* naik, dan sebagainya), kesenjangan sosial diperkecil.

2. *Weakness*

- a. Minimnya kontrol pemerintah sehingga regulasi kurang. Pihak yang lemah akan tertindas yang kuat akan merajalela dan sebagai objek mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
- b. Akibatnya ,masyarakat jadi konsumtif dan akhirnya akan terlilit dengan utang.

3. *Opportunity*
 - a. Dana untuk pertumbuhan ekonomi lebih besar dan dana tersebut juga datang dari pihak swasta. Dengan banyaknya pihak yang berinvestasi, lapangan pekerjaan bisa lebih banyak tercipta, peluang bisnis terbuka lebar karena ekonomi akan tumbuh dengan cepat.
 - b. Akan bermunculan peluang-peluang bisnis baru.
4. *Threat* (ancaman)
 - a. Kekayaan tidak akan merata. GDP bisa naik namun rakyat bisa menderita.
 - b. Pihak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.

H. PENUTUP

Neoliberalisme tidak lebih dari kumpulan pemikiran antiintervensi pemerintah dalam perekonomian yang sangat beragam dan bisa saja bertentangan dengan akar pemikiran neoklasik. Dalam liberalisme, pemerintah harus membebaskan mekanisme pasar bekerja, harus melakukan deregulasi dengan mengurangi *restriksi* (hambatan) pada proses produksi, mencabut semua rintangan birokratisasi perdagangan, ataupun menghilangkan tarif bagi perdagangan demi menjamin terwujudnya *free trade*. Perdagangan dan persaingan bebas adalah cara terbaik bagi ekonomi nasional untuk berkembang. Dengan demikian, liberalisme di sini berkonotasi “bebas dari kontrol pemerintah”, atau kebebasan individu untuk menjalankan persaingan bebas, termasuk kebebasan bagi kaum kapitalis untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Daftar Pustaka

- Arief, Sritua. 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Imamul. 2009. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Jakarta: Setia Purna Inves.
- Chapra, Umer M. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, Adiwarmarman A. 2001. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rangkuty, Freddy. Tanpa Tahun. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saefuddin, A.M. 1986. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat.
- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sumarni, Murti dan John Soeprihanto. 1987. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Liberty.
- Zadjuli, Suroso Imam Zadjuli. 1999. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Unair.
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/05/25/neoliberalisme/>
- <http://vivanews.com>, Jum'at, 31 Juli 2009